



SEJARAH PNI: SEJAK BERDIRINYA HINGGA PERPECAHAN

HISTORY OF PNI: FROM ITS FOUNDING TO ITS SPLIT

Eef Saefullah¹, Topan Adi Saputra², Dede Komariyah³

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : eefsaefullahsahel04@gmail.com^{1*}, topansptra4@gmail.com², dedekomariyah456@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 21-03-2025

Revised : 23-03-2025

Accepted : 25-03-2025

Published : 27-03-2025

Abstract

Early 20th century Indonesia was still in the grip of the Dutch colonial government, this triggered national awareness and efforts to achieve independence. The 20th century movement experienced a change towards more diplomatic with the emergence of organizations engaged in politics, social and education. At this time, PNI became one of the organizations that played a role in the struggle for Indonesian independence. The emergence of PNI as a large organization worried the Dutch government, especially with its attitude that was very anti-colonial government. This article will discuss the beginning of the establishment of PNI until its split in 1931.

Keywords: *PNI, Movement, Organization*

Abstrak

Awal abad 20 Indonesia masih berada dalam genggaman pemerintah Kolonial Belanda, hal ini memicu kesadaran Nasional dan upaya upaya untuk meraih kemerdekaan. Pergerakan abad 20 mengalami perubahan kearah yang lebih diplomatis dengan munculnya organisasi organisasi yang bergerak dalam bidang politik, sosial dan Pendidikan. Pada zaman ini, PNI menjadi salah satu organisasi yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Munculnya PNI sebagai organisasi besar, membuat khawatir pemerintah Belanda terutama dengan sikapnya yang sangat anti degngan pemerintah Kolonial. Tulisan ini akan membahas mengenai awal mula berdirinya PNI hingg perpecahannya pada 1931.

Kata Kunci: *PNI, Pergerakan, Organisasi*

PENDAHULUAN

Pada abad ke 20 Indonesia masih berada dibawah penjajahan Kolonial Belanda, penjajahan yang telah lama berkuasa di Indonesia memunculkan berbagai reaksi perlawanan dari berbagai kalangan di Indonesia. Dimulai dari perlawanan bersenjata maupun perjuangan secara diplomatis yang diwujudkan dengan pendirian berbagai macam organisasi yang akan menampung berbagai aspirasi dari berbagai kalangan. Terutama setelah pemerintah Kolonial menerapkan politik balasa budi yang digagas oleh Van Deventer seorang Belanda yang berfaham Liberalis pada 1889. Politik balas budi menekankan pentingnya balas budi Pemerintah Kolonial terhadap koloninya dengan mendirikan sekolah sekolah agar kaum pribumi mendapatkan pendidikan yang layak.



Lahirnya Boudi Utomo pada 1918 menjadi awal mula pergerakan non bersenjata yang ditempuh dengan diplomatis. Organisasi Boedi Utomo didirikan oleh para pelajar STOVIA yang merupakan sekolah pendidikan kedokteran untuk kaum priyayi Jawa yang kelak akan menjadi timbulnya organisasi lain (Yusuf Perdana dan Rinaldo A., 2022). Organisasi menjadi wadah berkumpulnya aspirasi bumiputera yang termaginalkan oleh kebijakan Pemerintah Kolonial, selain itu kehadiran pergerakan melalui organisasi menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan visi dan misi yang sama. Organisasi organisasi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu meraih kemerdekaan Bangsa Indonesia. Organisasi yang hadir ini meliputi berbagai bidang (multidimensi), baik itu sosial, budaya, ekonomi, serta yang paling menonjol dan berdampak, yaitu politik (B. Wahyuni dan I. F. Mursal, 2022).

PNI didirikan pada 1927 oleh para pelajar yang tergabung dalam *Algemeene Studio Club* dengan Ir. Soekarno sebagai ketua. PNI merupakan organisasi pergerakan yang berperan aktif dalam melancarkan berbagai pergerakannya. PNI hadir sebagai wadah baru setelah PKI resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Kolonial. PNI berusaha menarik dukungan massa dengan melancarkan propagandanya melalui surat kabar, rapat umum dan pendirian sekolah sekolah (Hotman Pasaribu, 2014). Dalam tulisan ini kami akan memuat tentang seapak terjang PNI pada pergerakan sebelum masa kemerdekaannya.

METODE PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian ini, berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik ini dipelajari, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik, proses analisis dilakukan dengan membaca, memahami, dan menafsirkan isi dari berbagai referensi. Dengan cara ini, penelitian bisa menemukan, membandingkan, dan menyusun kembali ide-ide dari penelitian sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya PNI

Indonesia memiliki berbagai macam partai politik yang berfungsi sebagai wadah perjuangan serta sebagai penyalur aspirasi-aspirasi yang akan ditampung dalam partai politik. Partai politik berperan sebagai alat pembangkit rasa Nasionalisme bangsa Indonesia yang disalurkan dengan pergerakan-pergerakan yang dinaungi oleh partai politik (A. Gau Kadir, 2014). Dalam konteks perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, partai politik menjadi wadah pergerakan yang ampuh untuk menentang pemerintah Kolonial Belanda. Terutama pada awal abad ke-20, perjuangan rakyat Indonesia mengalami perubahan, perjuangan bersenjata mulai berkurang karena seringnya mengalami kegagalan dan berubah menjadi perjuangan melalui diplomasi dengan mendirikan organisasi-organisasi dan partai politik yang terorganisir secara rapi.

Pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1926 dan PKI resmi dilarang oleh pemerintah Kolonial, masyarakat Indonesia merasakan bahwa perlunya wadah



untuk menyampaikan aspirasi dan semangat perjuangan. Sejalan dengan itu, munculnya banyak gerakan-gerakan diplomatis turut menyulut munculnya rasa Nasionalisme. Diantara mereka terdapat penganut Nasionalisme radikal dan moderat, keduanya walau berbeda dalam menyikapi rasa Nasionalisme, namun tetap pada tujuan yang satu yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dari Kolonialisme Belanda (Nugroho Notosusanto, dkk., 2008).

PNI menjadi wadah baru bagi perjuangan bangsa Indonesia setelah pemerintah Belanda secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa PKI merupakan gerakan terlarang pada 1927 akibat pemberontakan yang dilakukan oleh para simpatisan PKI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno pada rapat yang diadakan oleh Algemeena Studio Club di Bandung. Rapat ini dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh penting pergerakan, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunario. PNI berusaha mengarahkan rasa semangat kebangsaan menjadi kekuatan Nasional untuk meraih impian Bangsa Indonesia yang didasari oleh rasa kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan bagi semua kalangan. PNI memulai gerakannya dengan menyebarkan propaganda-propaganda yang intensif dan agresif kepada masyarakat Indonesia melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam koran, lembaran lembaran kertas, dan juga secara lisan. Tentunya propaganda tersebut dilakukan demi mendapatkan dukungan massa yang besar yang kelak menjadi kekuatan bagi pergerakan PNI. Dalam proses pergerakannya, PNI kerap menyatakan bahwa tujuan didirikannya PNI adalah bekerja untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Maka untuk tujuan besar ini PNI membentuk asas yaitu "Percaya pada diri sendiri" yang artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial dengan kebiasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri, antara lain dengan mendirikan poliklinik kesehatan, pendirian sekolah bagi pribumi, bank Nasional, dan perkumpulan koperasi. Berdasarkan asas yang dipegang teguh oleh PNI, menjadikannya tidak ingin mengikuti dewan dewan yang diadakan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam hal ini PNI bersifat Non-Koperatif, artinya tidak menjalin kerja sama dengan pemerintah Kolonial dalam menjalankan gerakannya (Sejarah Nasional Indonesia Jilid V).

Dalam menjalankan pergerakannya Partai PNI termasuk kedalam golongan yang radikal, sikap radikalnya dapat dilihat dari sikapnya yang Non-Kooperatif terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Sikap Non-Koperatif diwujudkan pada penolakan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Kolonial, sikap radikal dalam pergerakan terjadi saat Tjipto Mangunkusumo mengalami kegagalan untuk merubah Boedi Utomo dari organisasi Kultural menjadi politik (Wiryopranoto, dkk., 2015).

Radikalisme yang terjadi pada gerakan gerakan politik merupakan representasi dari rasa Nasionalisme yang menggebu, radikalisme tumbuh subur pada gerakan gerakan politik bahkan pada gerakan politik yang pada awalnya mau bekerja sama dengan pemerintah lalu berubah menjadi radikal, hal ini terjadi pada zaman Gubernur Hindia Belanda yaitu J.P. van Limburg Stirum, yang menjabat antara tahun 1916-1921 yang berpaham liberal (A. F. Kurniawati, dkk., 2015). Selain itu terdapat dua faktor terbesar yang menyebabkan tumbuhnya radikalise dalam



pergerakan, antara lain 1) Krisis ekonomi yang menimpa Nusantara pada 1921 dan dimulai dengan krisis pabrik gula pada 1918 setelah berakhirnya perang dunia dua, 2) Terjadinya mutasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock yang memiliki sifat reaksioner (1921-1926) (B. R. N. Aji, dkk., 2020).

Pada awal berdirinya PNI merupakan akronim dari ‘Perserikatan Nasional Indonesia’, lalu berubah menjadi Pergerakan Nasional Indonesia setelah satu tahun berdiri pada kongres pertamanya yang diadakan di Surabaya (M. C. Ricklefs, 2007). Syarat untuk menjadi anggota PNI harus berumur 18 tahun, PNI juga memiliki struktur sebagaimana partai lainnya yaitu Soekarno sebagai ketuanya karena dipandang sebagai orang yang paling populer lalu M. Isqak sebagai sekretaris sekaligus mencakup sebagai bendahara. PNI hadir sebagai pergerakan politik yang bersifat Nasional dan netral terhadap semua golongan, selain itu PNI berperan sebagai pemrakarsa gerakan politik Nasionalis, berbeda dengan Sarekat Islam yang bersifat keagamaan dan PKI yang bersifat Marxisme. Karena sifatnya yang Nasionalis menjadikan PNI memiliki anggota yang beragam dan berasal dari latar belakang yang berbeda lalu disatukan dalam pergerakan PNI (Sudiyo, dkk., 1997).

PNI menjalin kerja sama dengan organisasi politik lain dalam mencapai tujuannya, seperti Budi Utomo, Partai Sarekat Islam, Pasundan Soematrاند Bond, Kaum Betawi. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menggalang persatuan dalam mencapai kemerdekaan. Cita cita persatuan PNI selalu ditekankan pada rapat rapat gabungan dengan organisasi politik lain dan juga pada rapat umum PNI. Pada rapat gabungan yang diadakan di Bandung pada 17-18 Desember 1927 beserta dengan organisasi lain PNI bersepakat untuk mendirikan suatu perhimpunan yang bernama Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Berdirinya perhimpunan tersebut diharapkan menjadi wadah perjuangan Bangsa Indonesia yang dihimpun dalam satu federasi, sehingga cita cita dapat diraih secara bersama melalui persatuan yang menjadi kekuatan utama dalam (Sejarah Nasional Indonesia Jilid V).

2. Pergerakan PNI

Dalam menjalankan pergerakannya PNI bersifat radikal dan Non-Koperatif terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Keberadaan PNI turut mengganggu kekuasaan Belanda setelah PKI, karena kedua partai tersebut memiliki jumlah massa yang banyak, massa yang banyak menjadi kekuatan tersendiri bagi kedua partai tersebut. PNI termasuk kedalam organisasi yang radikal, sebagaimana pernyataan Soekarno bahwa PNI tidak takut untuk melawan pemerintah Kolonial Belanda dengan keras dan tegas atas setiap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan dan cenderung merugikan kaum bumiputera (N. Valentina, 2022).

Kongres pertama PNI dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 27-28 Maret 1928, dalam kongres pertama tersebut diputuskan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Mr. Sartono sebagai bendahara serta rancangan rencana pergerakan yang akan dilakukan oleh PNI. Rencana pergerakan PNI akan diwujudkan pada usaha-usaha perbaikan pada bidang sosial, politik, dan



ekonomi. Tujuan utama dari kongres tersebut adalah mengesahkan asas dasar, dan program kerja PNI sesuai dengan hasil musyawarah pada kongres. Selain itu, kongres tersebut diadakan guna memperkenalkan PNI kepada masyarakat beserta dengan tujuan tujuannya, sehingga kongres tersebut turut pula dihadiri oleh wakil wakil dari organisasi lain (Sejarah Nasional Indonesia Jilid V).

Selain pada organisasi politik, PNI juga turut memasukkan pengaruhnya pada gerakan pemuda. Hal tersebut dilakukan demi menggalang persatuan dari seluruh golongan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada kongres pemuda kedua yang diadakan di Jakarta pada 26-27 Oktober 1928 PNI turut hadir sebagai bentuk partisipasi dalam gerakan kemerdekaan. Kongres pemuda tersebut ditutup dengan diikrarkannya sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai bentuk rasa persatuan. Sehingga pada 1930 hampir seluruh perkumpulan pemuda meleburkan diri kedalam Indonesia Muda (Sejarah Nasional Indonesia Jilid V).

PNI memiliki dua untuk memperkuat gerakannya, yaitu : gerakan kedalam, diwujudkan dengan mendirikan sekolah sekolah, mendirikan bank-bank, dan mengadakan kursus kursus pelatihan dan sebagainya. Kedua, Gerakan keluar, diwujudkan dengan mendirikan surat kabar yang bernama *Banteng Priangan* (terletak di Bandung) dan *Persatoean Pemuda* (terletak di Jakarta). Kedua surat kabar tersebut digunakan untuk memperkuat opini publik tentang PNI sehingga dapat menarik massa sebanyak mungkin. Dalam surat kabar tersebut dimuat tulisan tulisan pemikiran anggota PNI dan rapat umum yang diadakan oleh PNI. Kegiatan PNI yang sangat massif dan agresif membuat cemas pemerintahan Kolonial Belanda. Belanda khawatir bahwa pergerakan PNI dapat mengguncangkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Gubernur Jendral pada saat itu membuka siding *Volksraad* pada tanggal 15 Mei 1928 dengan harapan bahwa rakyat akan tersadarkan terhadap Nasionalisme yang ekstrem. Sebenarnya PNI telah mendapatkan peringatan yang halus dari Pemerintah Kolonial terkait pergerakannya yang dinilai radikal, namun gerakan PNI tetap tumbuh subur dan akan membuka cabang cabang di seluruh Indonesia. Tujuh cabang pertama terdapat di Bandung, Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Pekalongan, dan Palembang. Hingga pada tahun 1929 tercatat terdapat sekitar 10.000 anggota PNI dan 6.000 diantaranya terdapat di Priangan (Noto Soetardjo, H.A , 1961).

PNI memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Asas PNI adalah self-help, non-mendiacy, dan marhaensime, yang berarti menolong diri sendiri, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, dan memiliki ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata. PNI berkembang pesat setelah didirikan, dengan jumlah anggota yang mencapai 10.000 orang pada akhir tahun 1929. Namun, pemerintah kolonial Belanda merasa cemas dengan pengaruh PNI dan mulai menindak partai ini. Pada tanggal 24 Desember 1929, pemerintah Belanda menangkap empat pemimpin PNI, termasuk Ir. Soekarno. Setelah Bung Karno ditahan, kepemimpinan PNI diambil alih oleh Mr. Sartono. Namun, PNI kemudian terpecah menjadi dua, yaitu PNI Baru dan Partindo. Partindo didirikan oleh Bung



Karno setelah ia keluar dari penjara dan memiliki tujuan yang sama dengan PNI, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia (Aida Faida).

3. Perpecahan Dalam PNI

Perpecahan dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. PNI didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno dan kawan-kawan sebagai partai yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, PNI mengalami berbagai dinamika internal yang menyebabkan perpecahan.

PNI awalnya bersatu dalam semangat nasionalisme, tetapi seiring waktu, muncul perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan. Beberapa anggota menginginkan pendekatan yang lebih radikal, sementara yang lain lebih moderat. Dalam PNI, terdapat berbagai faksi yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Faksi-faksi ini sering kali memiliki kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan ketegangan di dalam partai. Situasi politik di Indonesia yang dipengaruhi oleh kekuatan kolonial Belanda dan kemudian Jepang juga berkontribusi pada perpecahan. Ketika Jepang menduduki Indonesia, PNI terpaksa beradaptasi dengan situasi baru, yang menyebabkan pergeseran dalam struktur dan kepemimpinan partai (Soekarno, 1964).

Perpecahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1930-an. Pada tahun 1931, PNI mengalami perpecahan besar ketika sebagian anggota, yang dipimpin oleh Soekarno, keluar dan membentuk PNI Baru. PNI Baru lebih condong kepada ideologi sosialis dan lebih radikal dalam pendekatannya terhadap perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, PNI yang lama tetap berpegang pada pendekatan yang lebih moderat dan reformis.

Perpecahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap gerakan nasionalis di Indonesia. PNI yang terpecah menjadi dua faksi ini mengakibatkan fragmentasi gerakan nasionalis, yang pada gilirannya mempengaruhi strategi perjuangan melawan penjajahan. Meskipun demikian, perpecahan ini juga membuka ruang bagi lahirnya partai-partai baru dan gerakan-gerakan lain yang lebih beragam dalam pendekatan dan ideologi (Ricklefs, M.C., 2001).

Perbedaan visi dan strategi ini menyebabkan perpecahan dalam PNI. Pada tanggal 25 April 1931, Ir. Soekarno dan beberapa anggota PNI lainnya mendirikan Partindo (Partai Indonesia), yang memiliki tujuan yang sama dengan PNI, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Mr. Sartono dan beberapa anggota PNI lainnya tetap memimpin PNI, yang kemudian dikenal sebagai PNI Baru. Perpecahan dalam PNI memiliki dampak yang signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perpecahan ini menyebabkan perpecahan dalam tubuh pergerakan nasional, yang membuat perjuangan kemerdekaan menjadi lebih sulit. Namun, perpecahan ini juga memungkinkan Ir. Soekarno dan Partindo untuk memperluas basis massa dan meningkatkan perjuangan non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda (H. Agus Salim, 1985).



KESIMPULAN

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno dan sejumlah tokoh nasionalis lainnya sebagai respons terhadap penjajahan Belanda. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengedepankan semangat nasionalisme dan persatuan. Pendirian PNI menandai langkah penting dalam sejarah pergerakan nasional, di mana partai ini menjadi salah satu wadah utama bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam melawan kolonialisme.

Sejak berdirinya, PNI aktif dalam mengorganisir gerakan nasionalis dan menyebarkan ide-ide kemerdekaan. PNI berperan dalam mobilisasi massa, penyebaran kesadaran politik, dan penggalangan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI mengembangkan strategi yang mencakup aksi-aksi politik, demonstrasi, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran rakyat. PNI juga berusaha menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain untuk memperkuat gerakan nasional.

Perpecahan dalam PNI terjadi pada awal 1930-an, yang dipicu oleh perbedaan ideologi dan strategi di antara anggotanya. Pada tahun 1931, sebagian anggota yang lebih radikal, dipimpin oleh Soekarno, membentuk PNI Baru, sementara PNI yang lama tetap berpegang pada pendekatan yang lebih moderat. Perpecahan ini menciptakan fragmentasi dalam gerakan nasionalis, yang berdampak pada efektivitas perjuangan melawan penjajahan. Meskipun demikian, perpecahan ini juga membuka peluang bagi lahirnya partai-partai baru dan pendekatan yang lebih beragam dalam perjuangan kemerdekaan.

Secara keseluruhan, PNI memainkan peran krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mengalami perpecahan, PNI berhasil menginspirasi generasi berikutnya dan menjadi salah satu fondasi bagi gerakan nasionalis yang lebih luas. Perjuangan dan dinamika internal PNI mencerminkan kompleksitas politik dan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Kurniawati, T. Yuniyanto, dan S. Bachri, "Politieke Inlichtingeh Dienst (PID) Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1916-1942", *Candi* 10, no. 2 (2015)
- A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik di Indonesia", *Sosiohumaniora*, 16.2 (2014)
- Aida Faida: Makalah Partai Nasional Indonesia.
- B. R. N. Aji, Sumarno, dan Eko Satriya Hermawan, "Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme", (Surabaya: Unesa University Press I, 2020)
- B. Wahyuni dan I. F. Mursal, "Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942," *Jurnal Sejarah* 2, no. 1 (2022)
- H. Agus Salim, "Dijalan Ke Luar Dari Keterjajahan", dalam "Dokumen-Dokumen Sejarah Indonesia", Yayasan Idayu, Jakarta, 1985.



- Hotman Pasaribu and Universitas Jambi, 'Pni: Organisasi Politik Radikal Soekarno Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1927-1931)', *Krinok : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 3.1 (2024)
- M. C. Ricklefs, "Sejarah Indonesia Modern 1200-2004", (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- N. Valentina, "PNI Organisasi Politik Sesudah 1926", *HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (2022)
- Noto Soetardjo, H. A, "Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial", (Jakarta: Lembaga Penggalan dan Perhimpunan Sedjarah Revolusi Indonesia, 1961)
- Nugroho Notosusanto and Marwati Djoened Poesponegoro, "Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda", (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Ricklefs, M. C., "A History of Modern Indonesia c. 1300 to the Present", Stanford University Press, 2001.
- Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda'
- Soekarno, "Di Bawah Bendera Revolusi", Jilid I, Jakarta: Penerbitan Bulan Bintang, 1964.
- Sudiyo, Dalimun Santono, Agus Nugroho, dan Edy Suwardi, "Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai dengan Pengakuan Kedaulatan", (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997)
- Wiryopranoto Suhartono dan Herlina, "Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Pengabdianya", (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2015)
- Yusuf Perdana dan Rinaldo A., "Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia", (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022)